

## Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, *Fiscal Stress* dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyerapan Anggaran dengan *Rebudgeting* sebagai Variabel Moderasi

Silvia Wulandari<sup>1\*</sup>, Eka Fauzihardani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

\*Korespondensi: [silviawulandari927@gmail.com](mailto:silviawulandari927@gmail.com)

---

**A**

### Abstract

*This research aimed to analyze remaining budget calculations, fiscal stress, local revenue on budget absorption with rebudgeting as moderating variables in regency/city governments in West Java Province. The population in this study were all 27 regency/cities in West Java Province. The sample collection method used purposive sampling, while the data processing method used multiple linear regression analysis. The results of statistical tests show that the remaining excess of budget calculations and local revenue has a significant positive effect on budget absorption, but fiscal stress has no effect on budget absorption. rebudgeting as a moderating variable can moderate the relationship between the remaining excess of budget calculations and budget absorption but rebudgeting is not able to moderate the relationship between fiscal stress, local revenue and budget absorption.*

**Keywords :** *Remaining Budget Calculation; Fiscal Stress; Local Revenue; Budget Absorption; Rebudgeting.*

### How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)

Wulandari, W. & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, *Fiscal Stress* dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyerapan Anggaran dengan *Rebudgeting* sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (1), 93-110.

---

## PENDAHULUAN

Paradigma keuangan negara Republik Indonesia mengalami transisi secara fundamental dalam bidang sosial dan politik, sehingga mendorong perubahan besar dalam pengelolaan keuangan negara menjadi desentralistik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fiskal bagi daerah. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan oleh masing-masing daerah otonom dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan umum dan daya saing daerah.

Salah satunya yaitu penganggaran sektor publik yang menjadi instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Adanya sistem penganggaran dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan sehingga terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Merujuk pada pendapat Said (2015) mengenai *Stewardship Theory* yang menegaskan bahwa manajemen yang mempunyai peran bertanggung jawab atas kepuasan

pelayanan publik, dengan demikian dapat menggambarkan pemerintah selaku pihak yang dapat dipercaya menjalankan tugas dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah. Bentuk pertanggung jawabannya yaitu dalam penyerapan anggaran daerah pada pemerintah dapat tercapai dengan maksimal.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat salah satu pemerintah daerah yang mengalami masalah pada pencapaian realisasi belanja yang belum mencapai target. Hal ini terbukti bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat mencatat Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Barat di tahun anggaran 2019 dinilai rendah dengan serapan APBD mencapai 62,79% hingga 25 oktober 2019, yang mana pada harusnya target realisasi anggaran pada triwulan III sebesar 70%. Dibandingkan dengan serapan anggaran tahun 2018 yang mencapai hasil 94,42% sesuai dengan yang ditargetkan, dari total anggaran Rp. 37,75 T berhasil terserap Rp. 33,76 T. Hal ini dinilai sebagai salah satu yang terbaik dengan total APBD 2018 jauh lebih besar dibandingkan dengan APBD pada tahun sebelumnya. Fenomena yang terjadi mengenai penyerapan anggaran juga disampaikan oleh Pejabat Sekretaris Daerah Jawa Barat yang mengatakan pada rapat evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah mengatakan bahwa realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019 pada awal juli dinilai rendah senilai 54,72% hingga 27 September 2019. Ia juga mengatakan faktor yang rendahnya serapan tersebut karena terlambatnya proses lelang serta pencairan bantuan keuangan ke daerah yang sempat terhenti saat pemilu.

Berdasarkan fenomena diatas, adanya ketidaksesuaian antara target APBD yang direncanakan dengan realisasi APBD yang dicapai merupakan bagian dari permasalahan dibidang penyerapan anggaran, yaitu ketika anggaran yang ditargetkan tidak sejalan dengan realisasi maka dapat menyebabkan timbulnya sisa anggaran yang disebut dengan SiLPA.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) adalah selisih antara realisasi pendapatan, belanja anggaran dan penerimaan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Tingginya rasio SiLPA mengindikasikan kurangnya perencanaan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan hal-hal yang menyebabkan keterlambatan penyerapan belanja.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyebutkan 10 Provinsi dengan SiLPA yang cukup besar, salah satunya yaitu Provinsi Jawa Barat memiliki sisa lebih perhitungan anggaran melebihi Rp. 2.250 T ditahun 2018. Terkait tingginya SiLPA tersebut menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengidentifikasi peran pemerintah dalam membuat perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik, sehingga dana yang tersisa tidak teralokasikan secara efisien (Wiguna, 2019).

Permasalahan selanjutnya yang dapat menjadi hambatan dalam proses penyerapan anggaran ialah karena adanya tekanan keuangan atau *fiscal stress*. *Fiscal stress* merupakan tekanan yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan pendapatan anggaran pada pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kemandirian daerah. Menurut Arnett (2011) *fiscal stress* merupakan ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban keuangan dan disertai dengan ketidakmampuan meningkatkan pendapatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pasokan barang dan jasa kepada masyarakat. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa pemerintah daerah yang mengalami tekana fiskal tidak fleksibelitas dalam penyesuaian anggaran sehingga tidak mampu meningkatkan kinerja penyerapan anggaran pada pemerintah tersebut.

Permasalahan lain yang menjadi kendala penyerapan anggaran adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Halim (2014) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah selain dana transfer dan penerimaan lain yang sah, sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pada pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan salah satu aspek yang mendukung anggaran belanja daerah yang dapat memberikan alokasi belanja untuk kebutuhan pembangunan serta pembenahan fasilitas publik, oleh karena itu pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang anggaran belanja daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan dengan menggali berbagai potensi daerah, sebab besar kecilnya pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi pembangunan dan pembiayaan untuk belanja daerah.

Permasalahan selanjutnya adalah *rebudgeting*. Menurut Anessi & Pessina et al., (2012) *rebudgeting* merupakan proses modifikasi yang dilakukan pemerintah sebagai ikhtiar dalam memperbaiki anggaran agar dapat mempengaruhi alokasi belanja dalam periode tahunan pelaksanaannya. Pada kenyataannya *rebudgeting* atau perubahan anggaran kerap dilakukan pemerintah daerah sebagai upaya menjalankan penyesuaian yang terjadi. *Rebudgeting* yang dilakukan provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 senilai Rp. 1,7 T yang difokuskan dalam pembangunan infrastruktur. *Rebudgeting* diperoleh dari kenaikan pendapatan asli daerah serta penambahan anggaran pada belanja langsung dan tidak langsung (News detik.com). *Rebudgeting* diharapkan mampu menunjang tingkat penyerapan anggaran pada anggaran belanja pada kab/kota di Provinsi Jawa Barat.

Adapun kebaruan pada penelitian ini adalah *rebudgeting* sebagai variabel moderasi. *Rebudgeting* sebagai pemoderasi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan anggaran yang didasarkan pada perkembangan-perkembangan yang berdampak pada anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mauliansyah (2017) yang menunjukkan bahwa perubahan anggaran berpengaruh positif terhadap serapan anggaran. Selanjutnya dengan riset yang sama dilakukan oleh Putri (2020) menyatakan perubahan anggaran berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran. Pada kenyataannya *rebudgeting* kerap dilakukan pemerintah daerah sebagai bentuk penyesuaian terhadap anggaran, dengan diadakannya *rebudgeting* diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan kualitas anggaran suatu pemerintah daerah. Maka dari itu *rebudgeting* diharapkan mampu menunjang tingkat penyerapan anggaran belanja pada kab/kota di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian skripsi ini mengkaji sisa lebih perhitungan anggaran, *fiscal stress*, PAD dan *rebudgeting* sebagai pemoderasi dalam melihat keterkaitannya terhadap penyerapan anggaran. Penelitian ini dilakukan karena penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi atau tidak konsisten, seperti penelitian Surbakti (2019) mengatakan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Putri (2020) menyatakan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang di atas, penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator dalam mengevaluasi kinerja atas aspek implementasi dan merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Hal yang sangat diperlukan dalam tolak ukur bagi upaya pembangunan infrastruktur publik khususnya pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, yaitu:

1. Apakah sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran?
2. Apakah *fiscal stress* berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran?
3. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran?
4. Apakah *rebudgeting* memoderasi pengaruh positif sisa lebih perhitungan anggaran terhadap penyerapan anggaran?
5. Apakah *rebudgeting* memoderasi pengaruh negatif *fiscal stress* terhadap penyerapan anggaran?

6. Apakah *rebudgeting* memoderasi pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap penyerapan anggaran?

## **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

### **Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)**

Teori *stewardship* merupakan teori yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989 yang berdasarkan pada sifat yang dimiliki manusia seperti dapat dipercaya, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas. Teori *stewardship* menjelaskan hubungan antara *stewards* dan *principals*. *Stewards* bertindak sebagai manajemen selaku pemerintah yang mengutamakan kepentingan bersama dalam mencapai tujuan organisasi dan *principals* selaku masyarakat. Dengan kata lain teori *stewardship* mampu menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan masyarakat dan kesuksesan organisasi.

Said (2015:104) menegaskan bahwa teori *stewardship* merupakan manajemen yang berperan selaku pemerintah bertanggung jawab bagi kepuasan pelayanan terhadap publik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sudaryo (2017:54) mengatakan bahwa *Stewardship theory* merupakan situasi dimana manajemen bersikap sesuai kepentingan pemilik yaitu masyarakat, dan bertindak dengan pertimbangan yang logis dalam mengutamakan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan organisasi.

Salah satu tujuannya yaitu serapan anggaran pada masing-masing pemerintah daerah dapat tercapai maksimal. Dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai alat penggerak dalam menjalankan tugasnya mengelola serta bertanggung jawab atas perkembangan daerah. Implikasi tersebut dapat menjadi eksistensi pemerintah daerah selaku lembaga yang dipercaya masyarakat dalam mengelola, bertanggung jawab serta dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan publik dengan baik.

Pendekatan pada *stewardship theory* ini diadopsi untuk mengevaluasi hubungan sisa lebih perhitungan anggaran, *fiscal stress*, pendapatan asli daerah dan penyerapan anggaran dengan *rebudgeting* sebagai variabel *moderating* karena dianggap dapat memperkuat hubungan antara sisa lebih perhitungan anggaran, *fiscal stress*, dan pendapatan asli daerah terhadap penyerapan anggaran.

### **Penyerapan Anggaran**

Penyerapan anggaran mempunyai arti penting dalam pencapaian tujuan yaitu kemandirian daerah dalam mengelola anggaran dan belanja daerah. Menurut Rambe (2018) penyerapan anggaran adalah pencapaian atas evaluasi yang hendak dicapai selama periode tertentu (realisasi dari anggaran). Menurut Noviwijaya dan Rohman (2013) penyerapan anggaran merupakan perbandingan anggaran suatu kinerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Penyerapan anggaran juga dapat dijadikan alat ukur menentukan kesuksesan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan (Anfujatin, 2016).

### **Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran menyatakan bahwa belanja daerah adalah bentuk pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengurangi saldo. Belanja daerah berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 paragraf 36-40 ialah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja lain-lain atau belanja tak terduga dan Transfer keluar.

### **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**

Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 sisa anggaran tahun sebelumnya merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang belum terselesaikan. Sisa anggaran tahun sebelumnya dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi akibat realisasi pendapatan lebih kecil dibandingkan realisasi belanja, untuk membiayai pelaksanaan agenda lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan untuk membiayai kewajiban lain sampai akhir tahun anggaran yang belum dapat terselesaikan.

Terbentuknya sisa anggaran tahun sebelumnya dapat menunjukkan pemerintah daerah yang tidak tepat dalam mengelola anggaran yang sudah ditetapkan. Angka SiLPA yang besar dapat dimanfaatkan dalam mendanai agenda-agenda pemerintah daerah pada periode selanjutnya. Sejalan dengan yang dinyatakan Mahmudi (2010), bahwa SiLPA yang tersisa pada akhir periode dapat dimanfaatkan sebagai sumber atas pengelolaan anggaran periode berikutnya.

### ***Fiscal Stress***

Menurut Arnett (2011) *fiscal stress* merupakan ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban keuangan dan disertai dengan ketidakmampuan meningkatkan pendapatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pasokan barang dan jasa kepada masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Septira et al., (2019) *fiscal stress* adalah kondisi ketidakseimbangan antara pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan yang sediakan pemerintah melalui sumber daya yang tersedia.

*Fiscal stress* terjadi akibat pelaksanaan kebijakan desentralistik yang menyebabkan lahirnya otonomi daerah, dengan harapan pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dan mengelola kekayaan daerah agar dapat meningkatkan kemandirian daerah. Seperti yang dikatakan Nanga dalam Manafe et al., (2018) mengatakan perbedaan fiskal yang tinggi pada era otonomi daerah, hal ini disebabkan perbedaan sumber-sumber potensial yang mempengaruhi penerimaan daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain yang dianggap sah. Menurut Halim (2014) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu komponen sumber pendapatan daerah selain menerima dana transfer dan penerimaan lain yang sah, sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pada pemerintah daerah.

### ***Rebudgeting***

*Rebudgeting* atau perubahan anggaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa *rebudgeting* hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu periode anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa yang dimaksud adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar 50%.

Menurut Dougherty et al., (2003) *Rebudgeting* pada umumnya dilakukan untuk perbandingan target dan alokasi dengan kemajuan yang terjadi di lapangan. Adapun kemajuan yang terjadi akibat perubahan asumsi yang mempengaruhi pertimbangan atas pengeluaran dan penerimaan, sehingga target yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai seperti yang diharapkan.

### Hipotesis Penelitian

- H1: Sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.  
H2: *Fiscal Stress* berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran.  
H3: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.  
H4: *Rebudgeting* memperkuat pengaruh positif sisa lebih perhitungan anggaran terhadap penyerapan anggaran.  
H5: *Rebudgeting* memperlemah pengaruh negatif *fiscal stress* terhadap penyerapan anggaran.  
H6: *Rebudgeting* memperkuat pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap penyerapan anggaran.

### Model Penelitian

$$Y = a_1 + b_1SLPA + b_2FS + b_3PAD + b_4SLPA*RBG + b_5FS*RBG + b_6PAD*RBG + e$$

Keterangan :

- Y = Penyerapan Anggaran  
a = Konstanta  
b<sub>1</sub> = Koefisien Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
b<sub>2</sub> = Koefisien *Fiscal Stress*  
b<sub>3</sub> = Koefisien Pendapatan Asli Daerah  
b<sub>4</sub> = Koefisien Sisa Lebih Perhitungan Anggaran\**Rebudgeting*  
b<sub>5</sub> = Koefisien *Fiscal Stress*\**Rebudgeting*  
b<sub>6</sub> = Koefisien Pendapatan Asli Daerah\**Rebudgeting*  
SLPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
FS = *Fiscal Stress*  
PAD = Pendapatan Asli Daerah  
RBG = *Rebudgeting*  
ε = Nilai Residu

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode ilmiah dimana datanya berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistika (Sekaran, 2017).

Menurut Sugiyono (2017:80) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas banyak subjek atau objek yang mempunyai karakter serta kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kab/kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Berikut kabupaten/kota di provinsi Jawa barat. Jumlah Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 Kabupaten dan 9 Kota.

Sekaran (2006) mendefinisikan sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel *purposive* adalah pengambilan sampel berdasarkan atas tujuan dan kehendak peneliti sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan pertimbangan dan kriteria tertentu (Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini mempunyai kriteria yaitu, laporan keuangan pemerintah daerah yang telah di audit, pemerintah yang mempunyai sisa lebih perhitungan anggaran, pendapatan asli daerah dan perubahan anggaran dengan periode 2016-2020.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang dapat diperoleh dari instansi-instansi terkait (Supriana, 2016). Data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran di kab/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2015-2020. Data yang

digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series*. Data *time series* adalah data yang dikumpulkan secara berurutan dari waktu ke waktu terhadap objek pada setiap periode waktu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui website pemerintahan seperti badan pemeriksaan keuangan dan badan pengelola keuangan dan asset daerah provinsi Jawa Barat.

### **Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X1)**

Menurut Baldric (2015) Sisa lebih perhitungan anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Cara pengukuran pada penelitian ini sama dengan penelitian (Baldric, 2015) yang menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi SiLPA}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### **Fiscal Stress (X2)**

*Fiscal stress* merupakan tekanan fiskal yang terjadi pada pemerintah daerah yang disebabkan rendahnya penerimaan daerah dibandingkan pengeluaran daerah. Menurut Septira et al., (2019) *fiscal stress* adalah kondisi ketidakseimbangan antara pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan yang sediakan pemerintah melalui sumber daya yang tersedia. Cara pengukuran pada penelitian ini sama dengan penelitian (Arnett, 2011) yang menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

### **Pendapatan Asli Daerah (X3)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain yang dianggap sah. Cara pengukuran pada penelitian ini sama dengan penelitian (Surbakti, 2019) yang menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PAD = \text{Realisasi PAD}$$

### **Penyerapan Anggaran (Y)**

Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Anggaran adalah rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang terutang secara kuantitatif, dan dalam mengevaluasi perencanaan yang dijalankan pemerintah kita dapat melihat penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan anggaran yang direalisasikan dalam satu periode tahun anggaran. Cara pengukuran penyerapan anggaran pada penelitian ini sama dengan penelitian (Surbakti, 2019) yang menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Serapan anggaran} = \text{Realisasi anggaran belanja daerah}$$

### Rebudgeting (Z)

*Rebudgeting* merupakan salah satu agenda keuangan yang dilakukan untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan terjadi. Cara pengukuran *rebudgeting* pada penelitian ini sama dengan penelitian (Anessi-Pessina, *et al.*,2012) yang menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Anggaran Perubahan}}{\text{Anggaran Murni APBD}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnof (K-S) untuk menguji normalitas. Suatu data dikatakan normal apabila  $\text{Sig.} \geq \alpha = 0,05$ . Adapun hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		135
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,26987325
	Absolute	,064
Most Extreme Differences	Positive	,064
	Negative	-,063
Kolmogorov-Smirnov Z		,739
Asymp. Sig. (2-tailed)		,646
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Pada hasil uji statistik non-parametrik kolmogorov smirnov menyatakan bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,646 yang artinya  $> 0,05$ , maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

#### Uji Multikoloniaritas

Cara mengetahui adanya multikolonieritas adalah dengan menganalisis nilai tolerance dan lawannya *variabe inflator factor* (VIF). Indikasinya yaitu jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikolonieritas. Hasil pengujian multikolonieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Collinearity	
	Coefficients					Coefficients	Statistics
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF		
(Constant)	13,519	,848		15,937	,000		
Sisa Lebih							
1 Perhitungan	-1,244	,346	-,182	-3,590	,000	,797	1,255
Anggaran							
Fiscal Stress	,441	,220	,099	2,006	,047	,844	1,184



Pendapatan Asli Daerah	,548	,030	,872	18,271	,000	,899	1,112
Rebudgeting	-,069	,229	-,014	-,303	,762	,961	1,041

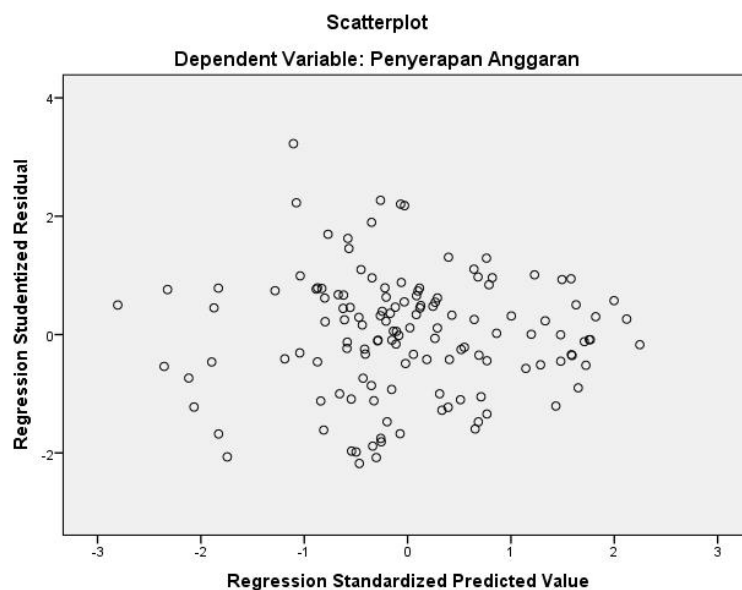
a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil perhitungan nilai VIF. Nilai VIF untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 1,255, nilai VIF *Fiscal Stress* sebesar 1,184, nilai VIF dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,112 dan nilai VIF *rebudgeting* sebesar 1,041. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen untuk persamaan regresi dengan nilai VIF < 10. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Cara mengetahui adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji *scatter plot*. Dimana dengan menggunakan scatter plot ini, heteroskedastisitas dapat dilihat dari pola yang terbentuk seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik yang menyebar di atas dan dibawah angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Gambar 1**  
**Hasil Uji Heterokedassitas**



*Sumber: Data sekunder diolah 2019*

Berdasarkan grafik scatter plot di atas, menunjukkan bahwa titik-titiknya tidak membentuk suatu pola tertentu dan titik menyebar diatas serta dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang baik dapat tercapai.

### Uji Linieritas

Ghozali (2016:159) uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Uji *Durbin Waston*. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka model terdapat hubungan linier secara signifikan antara variabel X dan variabel Y.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Linieritas Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran**

			Sum of	df	Mean	F	Sig.
			Squares		Square		
(Combined)			29,456	97	,304	1,564	,063
Penyerapan Anggaran * Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Between	Linearity	,424	1	,424	2,186	,148
	Groups	Deviation from	29,032	96	,302	1,558	,065
		Linearity					
	Within Groups		7,182	37	,194		
Total			36,638	134			

Hasil tampilan output di atas menunjukkan nilai sebesar 0,065 yang berarti  $> 0,05$  yang artinya terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel Penyerapan Anggaran dengan variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Linieritas Variabel Fiscal Stress Terhadap Penyerapan Anggaran**

			Sum of	df	Mean	F	Sig.
			Squares		Square		
(Combined)			32,579	114	,286	1,408	,191
Penyerapan Anggaran * Fiscal Stress	Between	Linearity	1,563	1	1,563	7,701	,012
	Groups	Deviation from	31,016	113	,274	1,352	,222
		Linearity					
	Within Groups		4,059	20	,203		
Total			36,638	134			

Berdasarkan tabel di atas nilai Sig. *deviation from linerity* sebesar 0,222 lebih besar dari 0,05 maka terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel Penyerapan Anggaran dengan variabel *Fiscal Stress*.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Linieritas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Anggaran**

			Sum of	df	Mean	F	Sig.
			Squares		Square		
(Combined)			36,354	132	,275	1,936	,402
Penyerapan Anggaran * Pendapatan Asli Daerah	Between	Linearity	25,814	1	25,814	181,426	,005
	Groups	Deviation from	10,540	131	,080	,565	,825
		Linearity					
	Within Groups		,285	2	,142		
Total			36,638	134			

Berdasarkan tabel di atas nilai Sig. *deviation from linerity* sebesar 0,887 lebih besar dari 0,05 maka terdapat hubungan linier secara signifikan antara variabel Penyerapan Anggaran dengan variabel *Rebudgeting*.

**Tabel 6**  
**Rangkuman Hasil Uji Linieritas**

Hubungan Variabel	Berdasarkan Nilai Sig.	Keterangan
Y*X1	0,065 > 0,05	Linear secara Signifikan
Y*X2	0,222 > 0,05	Linear secara Signifikan
Y*X3	0,825 > 0,05	Linear secara Signifikan
Y*Z	0,887 > 0,05	Linear secara signifikan

*Sumber: Data sekunder diolah 2021*

**Uji Statistik: Moderated Regression Analysis**  
**Uji Koefisien Determiasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Nilai adjusted R<sup>2</sup> akan menerangkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,856 <sup>a</sup>	,733	,727	,273042

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Fiscal Stress, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Berdasarkan hasil output di atas, diperoleh hasil koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) sebesar 0,727 artinya bahwa kontribusi variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 72,7% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

**Uji F**

Ghozali (2016:96) menjelaskan bahwa uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai signifikansi  $< 0,05$  maka dikatakan variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26,879	4	6,720	89,510	,000 <sup>p</sup>
	Residual	9,759	130	,075		
	Total	36,638	134			

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

b. Predictors: (Constant), Rebudgeting, Pendapatan Asli Daerah, Fiscal Stress, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Berdasarkan data output di atas diperoleh nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan berdasarkan  $F_{hitung}$  diperoleh sebesar  $89,510 > F_{tabel}$  sebesar 2,44, dengan ini dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak atau hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini berarti bahwa variabel independen yaitu *fiscal stress*, pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan

anggaran, dan *rebudgeting* sebagai variabel moderasi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penyerapan anggaran.

### Uji Hipotesis (Moderated Regression Analysis)

Menurut Liana (2009) *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 25 diperoleh hasil uji MRA (*Moderated Regression Analysis*) pada model dijelaskan pada tabel 9

**Tabel 9**  
**Hasil Uji MRA Model**

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients				
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13,424	,780		17,206	,000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	7,094	2,753	1,038	2,576	,011
Fiscal Stress	,987	2,148	,221	,459	,647
Pendapatan Asli Daerah	,504	,083	,803	6,099	,000
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran* <i>Rebudgeting</i>	-8,233	2,700	-1,258	-3,049	,003
Fiscal Stress* <i>Rebudgeting</i>	-,613	2,187	-,194	-,280	,780
Pendapatan Asli Daerah* <i>Rebudgeting</i>	,047	,079	,266	,598	,551

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Apabila nilai sig. < 0,05 atau t hitung > t tabel maka variabel independen tersebut dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dimana t tabel dengan n=135 dengan tingkat signifikansi 0,05 diketahui sebesar 1,6566. Arah pengaruh dilihat berdasarkan nilai  $\beta$  (baca:Beta), apabila nilai  $\beta$  yang dihasilkan positif berarti arah pengaruh hipotesis positif. Sebaliknya apabila arah Beta negatif maka arah pengaruh hipotesis juga negatif. Berdasarkan hasil pengolahan uji statistik pada tabel 4.7 di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X1) mempunyai nilai t hitung sebesar 2,576 dan nilai signifikansi 0,011 lebih kecil dari 0,05. Nilai  $\beta$  diperoleh sebesar 7,094 yang berarti arah positif, artinya sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini berarti hipotesis pertama (H1) diterima.
- Fiscal Stress* (X2) mempunyai nilai t hitung sebesar 0,459 dan nilai signifikansi 0,647 lebih besar dari 0,05. Nilai  $\beta$  diperoleh 0,987 yang berarti arah positif, artinya pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini berarti hipotesis kedua (H2) ditolak.
- Pendapatan Asli Daerah (X3) mempunyai nilai t hitung sebesar 6,099 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai  $\beta$  diperoleh 0,504 yang berarti arahnya positif, artinya sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini berarti hipotesis ketiga (H3) diterima.
- Variabel moderasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran\**Rebudgeting* menunjukkan hasil nilai 0,003 yang berarti signifikansi kecil dari 0,05 dan mempunyai t hitung -3,049. Nilai  $\beta$  yang dihasilkan adalah -8,233 artinya arah pengaruh negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) penelitian yaitu *rebudgeting* memperkuat

- pengaruh positif sisa lebih perhitungan anggaran terhadap penyerapan anggaran ditolak. Dengan demikian tidak tersedia bukti cukup untuk menerima H<sub>4</sub>, atau H<sub>4</sub> ditolak.
- e. Variabel moderasi *Fiscal stress\*Rebudgeting* dengan tingkat signifikansi 0,780 yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan mempunyai nilai t hitung -0,280. Nilai  $\beta$  yang dihasilkan adalah -0,618 yang berarti arah pengaruh negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H<sub>a</sub> ditolak dan H<sub>o</sub> diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan hipotesis kelima (H<sub>5</sub>) penelitian yaitu *rebudgeting* memperlemah pengaruh negatif *fiscal stress* terhadap penyerapan anggaran ditolak. Jadi tidak tersedia bukti yang cukup untuk menerima H<sub>5</sub>, atau H<sub>5</sub> ditolak.
  - f. Variabel moderasi Pendapatan Asli Daerah\**Rebudgeting* menunjukkan hasil tingkat signifikansi 0,551 yang berarti signifikansi lebih besar dari 0,05 dan mempunyai nilai t hitung 0,598. Nilai  $\beta$  diperoleh sebesar 0,047 yang berarti arah pengaruh positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H<sub>a</sub> ditolak dan H<sub>o</sub> diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan hipotesis kelima (H<sub>6</sub>) penelitian yaitu *rebudgeting* memperkuat pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap penyerapan anggaran ditolak. Jadi tidak tersedia bukti yang cukup untuk menerima H<sub>6</sub>, atau H<sub>6</sub> ditolak.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran terhadap penyerapan anggaran**

Hasil uji statistik di atas mendukung H<sub>1</sub> yang diajukan pada riset ini. Artinya dapat dikatakan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa ketika nilai sisa lebih perhitungan anggaran semakin tinggi maka realisasi belanja daerah semakin besar. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Surbakti (2019) yang menunjukkan hasil bahwa sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian yang dilakukan Rosdiana et al., (2020) menunjukkan bahwa sisa anggaran berpengaruh positif terhadap kas daerah. Artinya, dengan adanya sisa anggaran maka semakin tinggi kas daerah dalam mendanai kegiatan yang menyangkut kepentingan daerah sehingga dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran daerah.

### **Pengaruh *fiscal stress* terhadap penyerapan anggaran**

Hasil uji statistik pada riset ini tidak mendukung H<sub>2</sub> yang diajukan, atau tidak tersedia bukti yang cukup untuk mendukung H<sub>2</sub> pada riset ini. Artinya dapat dikatakan bahwa *fiscal stress* tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Dengan demikian hipotesis 2 (H<sub>2</sub>) ditolak yang menyatakan *fiscal stress* berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitannya antara *fiscal stress* dengan penyerapan anggaran.

Hasil riset ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanif (2017) yang memiliki hasil penelitian bahwa *fiscal stress* berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Putri (2020) menyatakan bahwa *fiscal stress* berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

### **Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap penyerapan anggaran**

Hasil uji statistik di atas mendukung H<sub>3</sub> yang diajukan pada riset ini. Artinya dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa ketika nilai pendapatan asli daerah semakin tinggi maka realisasi belanja daerah semakin besar.

Hasil riset ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2019), Rambe (2018) dan folet et al., (2007) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini disebabkan dengan tingginya nilai pendapatan asli daerah tentunya berpengaruh terhadap kas daerah, sehingga dapat digunakan untuk mendanai pembiayaan pemerintah daerah yang berdampak pada tingginya realisasi penyerapan anggaran.

#### **Pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran terhadap penyerapan anggaran dengan *rebudgeting* sebagai variabel pemoderasi**

Berdasarkan data penelitian ini, H4 yang diajukan ditolak. Hasil uji statistik menunjukkan pengaruh yang berbeda dengan yang dihipotesiskan. Dengan demikian, variabel kepatuhan terhadap regulasi ini memperlemah pengaruh positif variabel sisa lebih perhitungan anggaran terhadap penyerapan anggaran. *Rebudgeting* tidak dapat memperkuat pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mempunyai sisa anggaran dan melakukan perubahan anggaran justru dapat mengurangi terjadinya penyerapan anggaran atau kecilnya serapan anggaran yang terjadi dikarenakan beberapa hal, misalnya adanya penumpukkan anggaran yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, seperti berkurangnya waktu bagi eksekutif dalam merealisasikan program kegiatan yang telah direncanakan sehingga akan berakibat pada penumpukkan dana serta penganggaran pada sektor pemerintahan tidak terserap dengan baik.

#### **Pengaruh *fiscal stress* terhadap penyerapan anggaran dengan *rebudgeting* sebagai variabel pemoderasi**

Hasil uji statistik pada riset ini tidak mendukung H5 yang diajukan, atau tidak tersedia bukti yang cukup untuk mendukung H5 pada riset ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan *rebudgeting* tidak mampu menjadi variabel moderasi antara variabel independen terhadap dependen. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *rebudgeting* tidak mampu memoderasi pengaruh negatif *fiscal stress* terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *fiscal stress* yang dimoderasi oleh variabel *rebudgeting* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal terjadi karena *fiscal stress* tidak menjadi factor utama dalam mendukung peningkatan dalam penyerapan anggaran, sehingga tidak tersedia bukti cukup untuk menerima H5 atau H5 ditolak.

Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa dengan terjadinya tekanan fiskal pada pemerintah daerah dapat dikatakan bahwa *rebudgeting* tidak mampu memperlemah pengaruh *fiscal stress* terhadap penyerapan anggaran.

#### **Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap penyerapan anggaran dengan *rebudgeting* sebagai variabel pemoderasi**

Hasil uji statistik pada riset ini tidak mendukung H6 yang diajukan, atau tidak tersedia bukti yang cukup untuk mendukung H6 pada riset ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan *rebudgeting* tidak mampu menjadi variabel moderasi antara variabel independen terhadap dependen. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *rebudgeting* tidak mampu memoderasi pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah yang dimoderasi oleh variabel *rebudgeting* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal terjadi karena pendapatan asli daerah tidak menjadi faktor utama dalam mendukung peningkatan dalam penyerapan anggaran, sehingga tidak tersedia bukti cukup untuk menerima H6 atau H6 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat diasumsikan

dengan diberlakukannya perubahan anggaran atau *rebudgeting* tidak dapat mempengaruhi penyerapan anggaran. Permasalahan dapat terjadi karena adanya perubahan pada target penerimaan yang sudah ditetapkan pada awal tahun anggaran yang dapat berubah karena adanya prediksi yang kurang tepat seperti perubahan pajak dan retribusi daerah serta penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini. Masalah tersebut tentunya dapat mempengaruhi keluwesan pemerintah dalam pelaksanaan realisasi anggaran.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Anggaran. (2) *Fiscal Stress* tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran. (3) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Anggaran. (4) *Rebudgeting* tidak mampu memperkuat pengaruh positif Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran. (5) *Rebudgeting* tidak memoderasi pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Penyerapan Anggaran. (6) *Rebudgeting* tidak memoderasi pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Penyerapan Anggaran.

### **Keterbatasan**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: (1) variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 72,7% sedangkan sisanya 27,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan belum dapat menjelaskan sepenuhnya pengaruh terhadap penyerapan anggaran. (2) Objek pengamatan yang dipakai pada penelitian ini hanya pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, sehingga hasil riset yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan pada keseluruhan pemerintah daerah di Indonesia.

### **Saran**

Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan yang muncul dalam pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini belum dikatakan sempurna. Namun dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang harus dilakukan lebih lanjut diantaranya: (1) Bagi pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat agar dapat memkasimalkan tingkat penyerapan anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan belanja serta dapat menjalankan proyek-proyek yang sudah direncanakan. (2) Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi penyerapan anggaran. Salah satunya yaitu jenis pemerintahan daerah dapat dijadikan variabel rekomendasi untuk ditambahkan pada penelitian selanjutnya. (3) Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian dengan populasi seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan tujuan agar kesimpulan yang dihasilkan mempunyai cakupan pengetahuan dan informasi yang lebih baik terhadap penyerapan anggaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, S., & Halim, A. (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *VI*, 1140-1159.

- Afridzal, A., Abdullah, S., Saputra, M., Hasnawati, & Fazella, D. (2019). Education Expenditure in Aceh Local Governments An Empirical Evidence from Aceh. *Budapest Journal Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2(4), 334-343.
- Anfujatin. (2016). Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban. *DIA, Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 1-18.
- Anggriawan, F., Darwanis, & Abdullah, S. (2020). The Effect of Pure Expenditure Allocation, Budget Change, and Previous Year Remaining Budget on The Budget Absorption In The Governmental Work Unit of Banda Aceh City, Aceh Province, Indonesia. *Global Academic Journal of Economics and Business*, 2(1), 15-19.
- Ardhini, & Handayani, R. S. (2011). pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dalam perspektif teori keagenan (Studi pada kab/kota di Jawa Tengah).
- Badu, I., Awaluddin, I., & Mas'ud, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Profesionalisme, Gaya Kepemimpinan, Dan Struktur Organisasi. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, Volume 4, Nomor 1 (3), 99-113.
- Baldrice, S. (2015). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Candra, D., Zamzami, & Gowon, M. (2019). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Abk) Terhadap Kinerja Kepala Skpd Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating (Survey Pada Aparatur Pemerintah Provinsi Jambi). 33-43.
- Darma, Basri, H., & Syukriy, A. (2015). Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya, dan Perubahan Anggaran terhadap Serapan Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(2), 18-25.
- Dianawati, E. (2009). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Komitmen Organisasi Dan Job Related Stress Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI, Fakultas Ekonomi – Universitas Kanjuruhan Malang*, 1-13.
- Dougherty, M. J., Klase, K. A., & Song, S. G. (2003). Managerial Necessity and the Art of Creating Surpluses: The Budget-Execution Process in West Virginia Cities. *Public Administration Review*, 63(4), 484-497.
- Erlina, Saputra, A., & Muda, I. (2017). The Analysis of the Influencing Factors of Budget Absorption. *International Journal of Economic Research*, 14(12).
- Foley, C. F., Hartzell, J. C., Titman, S., & Twite, G. (2007). Why do firms hold so much cash? A tax-based explanation. *Journal of Financial Economics*, 86(3), 579-607.
- Forrester, J. P., & Mullins, D. R. (1992). Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. *Public Administration Review*, 52(5), 467-473.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 25 Edisi 9*.
- Gore, A. K. (2009). Why Do Cities Hoard Cash? Determinants and Implications of Municipal Cash Holdings. 84(1), 183-207.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan .* Jakarta : Salemba Empat.
- Hanif, I., & Suparno. (2017). Pengaruh Waktu penetapan Anggaran dan Fiscal Stress terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 107-115.
- Irfan, M., Santoso, B., & Effendi, L. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran dan Komitmen Organisasional sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17 No. 2, 158-175.
- Istri Maharani, A. A., & Ardiana, P. A. (2015). Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Asimetri Informasi, Dan Budaya Organisasi Pada Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi universitas udayana*, 770-785.
- Jimenez, B. S. (2009). Fiscal Stress and the Allocation of Expenditure Responsibilities between State and Local Governments: An Exploratory Study. *State & Local Government Review*, 41(2), 81-94.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN.



- Manafe, M. W., Ena, Z., & Adu, S. S. (2018). Fiscal Stress: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *21(2)*, 125-135.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit Andi.
- Mariyam. (2019). Analysis of Use of Remaining More Financial Budget Financing, Analysis of the Use of Backup Funds and Divestment Analysis of Management of Budget Income Budget Income On the Government of Binjai City. *Accounting and Business Journal, 1(1)*, 46-58.
- Mauliansyah, H. (2017). Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Besaran Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan Perubahan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota di Sumatera Utara). *Disertasi*.
- Miller, G. J., Robbins, D., & Keum, J. (2007). Incentives, Certification, and Targets in Performance Budgeting. *Public Performance & Management Review, 30(4)*, 469-495.
- Nellyanti, Darwanis, & Abdullah, s. (2016). Pengaruh perubahan anggaran pendapatan asli daerah, perubahan anggaran dana bagi hasil, dan perubahan anggaran sisa lebih perhitungan anggaran terhadap perubahan anggaran belanja langsung. *Jurnal Magister Akuntansi, 5(2)*, 68-78.
- Noviwijaya, A., & Rohman, A. (2013). Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran Kppn Semarang I. *Diponegoro Journal of Accounting, 2(3)*, 1-10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pessina, E. A., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2012). Budgeting and Rebudgeting in Local Governments: Siamese Twins? *Public Administration Review, 72(6)*, 875-884.
- Purwanto, A. (2016). Pengaruh Kondisi Keuangan dan Politik Terhadap Perubahan Anggaran Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 16(2)*, 87-96.
- Putri, I. R., & Yahya, M. R. (2020). Pengaruh Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya, Perubahan Anggaran dan Fiscal Stress Terhadap Serapan Anggaran Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.
- Rambe, F. A. (2019). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Skripsi*.
- Rosdiana, E., Arfan, M., Yahya, M. R., & Abdullah, S. (2020). The Effect of Receipt, Revenue, change in Shopping Budget, Shopping Budget Amount in The Cash Balance at The End of Year At Regional Government Treasury Agency (A Study on The Districts and Cities in Aceh Province, Indonesia). *3(4)*, 156-162.
- Rozai, M. A., & Subagiyo, L. (2015). Optimalisasi Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Organisasi. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia, 9(1)*, 75-89.
- Said, A. L. (2015). *Corporate Social Responsibility dalam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Methods For Business: A Skill Building Approach. Fourth Edition*. United kingdom; John wiley & Sons Ltd.
- Sekaran, u., & Roger, B. (2006). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach. Fourth Edition*. United kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Septian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.
- Septira, F., & Prawira, F. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fiscal Stress. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, 7(1)*, 57-64.
- Setyaningtyas, E. B. (2019). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Desentralisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah). Vol.9 No.2, 146-170.
- Shamsub, H., & Akoto, J. B. (2004). State and local fiscal structures and fiscal stress. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 16(1)*, 40-61.
- Siswati, E. (2014). Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14*, 105-109.

- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabesta.
- Surbakti, S. B. (2019). Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Skripsi*.
- Tehupuring, R. (2021). Mapping of budget Stress in Indonesia: Consequence on Budget Implementation. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 39-57.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. *tentang otonomi daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Uttari Premananda, N. P., & Yenni Latrini, N. M. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.18.3.2451-2476.
- Wiguna, K. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah. 28(1), 85-108.